

Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual Kaum Perempuan di Palangka Raya

Natali Purwanti¹, Riri Anggraini², Sarmuli³

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen ,
Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

*Email: natalipurwanti975@gmail.com; ririaaanggraini@gmail.com; sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id

Diterima: 05-10-2025 | Disetujui: 15-10-2025 | Diterbitkan: 17-10-2025

ABSTRACT

Sexual harassment against women is a form of gender-based violence that reflects unequal power relations within a patriarchal social structure. This study aims to analyze the phenomenon of women's understanding of sexual violence in Palangka Raya City from a gender perspective and to understand how an understanding of gender equality can be implemented in prevention and response efforts. This study uses a qualitative descriptive approach with secondary data analysis consisting of research findings, institutional reports, and government regulations. The analysis shows that the deeply rooted patriarchal culture in Palangka Raya reinforces discriminatory practices and perceptions against women. Lack of public awareness, limited assistance facilities, and weak implementation of protection policies are key factors hindering victims' survival. The implementation of gender studies through education, gender-sensitive policies, and women's empowerment has proven to be a strategic step in creating a just, safe, and free social environment from sexual violence.

Keywords: *gender studies; Showing the sexy side; patriarchy; gender equality; Palangka Raya.*

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam struktur sosial patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Palangka Raya melalui perspektif studi gender, serta memahami bagaimana pemahaman kesetaraan gender dapat diimplementasikan dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap data sekunder berupa hasil penelitian, laporan lembaga, dan regulasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Palangka Raya memperkuat praktik diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendampingan, dan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan menjadi faktor utama yang memperburuk situasi korban. Penerapan studi gender melalui pendidikan, kebijakan sensitif gender, serta pemberdayaan perempuan terbukti menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil, aman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Katakunci: studi gender; pelecehan seksual; patriarki; kesetaraan gender; Palangka Raya.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Natali Purwanti, Riri Anggraini, & Sarmuli. (2025). Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual Kaum Perempuan di Palangka Raya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1420-1426.
<https://doi.org/10.63822/xe5mq468>

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang hingga kini masih menjadi persoalan sosial serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tindakan kriminal individual, tetapi juga menggambarkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang berakar dalam sistem sosial patriarki. Dalam konteks masyarakat Palangka Raya, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan struktural yang kompleks, seperti norma patriarki, stereotipe gender negatif, serta minimnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban (Kharomah, 2022).

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2023) menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan perlindungan perempuan, seperti (Raya P. K., 2019) tentang Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaannya masih menghadapi kendala besar, termasuk keterbatasan tenaga profesional, fasilitas layanan korban yang minim, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus pelecehan (Handayani, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pelecehan seksual di Palangka Raya tidak dapat dilihat semata-mata sebagai masalah hukum, tetapi harus dipahami sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan ketimpangan gender dan budaya patriarki yang mengakar kuat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara ketimpangan gender dan kekerasan seksual di Indonesia. (Riyanti, 2019) menemukan bahwa pelecehan seksual merupakan akibat dari budaya pemerkosaan (rape culture) yang mengakar dalam masyarakat patriarki. (Suprobowati, 2025) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial memperluas bentuk pelecehan menjadi kekerasan daring (cyber harassment), sementara (Nurleni, 2022) menekankan hambatan sosial dan psikologis korban pelecehan di Palangka Raya akibat stigma dan fenomena victim blaming. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji dinamika lokal dan bagaimana struktur sosial di Palangka Raya berperan dalam memperkuat ketimpangan gender tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif studi gender dapat menjelaskan akar permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan di Palangka Raya, bagaimana struktur sosial dan budaya lokal turut memperkuat ketimpangan gender yang menyebabkan pelecehan seksual, serta bagaimana penerapan pemahaman studi gender dapat berperan dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan secara efektif di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual terhadap perempuan di Palangka Raya melalui perspektif studi gender, mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang memperkuat ketimpangan gender, serta menawarkan strategi penerapan pemahaman studi gender dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual secara komprehensif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik yang berkeadilan gender dan menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan perspektif studi gender untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Palangka Raya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan dan memahami secara mendalam berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual, serta bagaimana hal

tersebut berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial patriarki. Pendekatan kualitatif juga dianggap relevan untuk menafsirkan makna subjektif dari pengalaman perempuan korban pelecehan seksual, serta untuk menggali peran masyarakat dan lembaga dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan berbasis gender.

Data penelitian ini diperoleh melalui kombinasi antara data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Raya U. P., Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palangka Raya, 2023) Kota Palangka Raya, aktivis perempuan, pendidik, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKB3APM), Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta berbagai hasil penelitian dan artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Salah satu sumber data publik yang digunakan adalah Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang dapat diakses melalui basis data DPPKB3APM (<https://dppkb3apm.kaltengprov.go.id>).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara semi-terstruktur. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan laporan kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Palangka Raya. Observasi dilakukan di beberapa lingkungan sosial dan institusi pendidikan untuk melihat secara langsung bagaimana kesadaran gender diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman para informan mengenai faktor penyebab, dampak, dan strategi penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memperlihatkan pola dan keterkaitan antarvariabel sosial. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menafsirkan hasil temuan menggunakan perspektif studi gender agar dapat menjelaskan akar ketimpangan serta memberikan rekomendasi yang relevan terhadap isu pelecehan seksual di Palangka Raya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta hasil observasi lapangan. Selain itu, dilakukan pula member checking kepada beberapa informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas sosial yang mereka alami. Dengan rancangan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk ketimpangan gender yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan seksual, serta menunjukkan bagaimana penerapan studi gender dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang efektif dan berkeadilan di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual sebagai Cerminan Ketimpangan Gender di Palangka Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan di Palangka Raya tidak hanya terjadi karena faktor individu pelaku, tetapi merupakan cerminan dari ketimpangan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh budaya patriarki. Struktur sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat membuat perempuan rentan mengalami pelecehan, baik di ruang publik maupun privat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Riyanti, Analisis stereotipe gender dan budaya pemerkosaan, 2019) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari rape culture yang menormalkan dominasi laki-laki dalam masyarakat.

Selain itu, wawancara dengan petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Raya, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi yang rawan bagi perempuan. Faktor ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan rasa malu untuk melapor menyebabkan banyak korban memilih diam. Kondisi ini memperkuat pandangan (Hawini, 2024) bahwa patriarki tidak hanya membatasi peran perempuan, tetapi juga membungkam mereka melalui norma sosial yang menekan.

Dari sudut pandang studi gender, pelecehan seksual tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran moral atau hukum, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang timpang. Ketika masyarakat masih menganggap perempuan sebagai objek seksual atau mengaitkan perilaku korban dengan penyebab pelecehan, maka sistem patriarki terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus diarahkan pada perubahan paradigma sosial dan peningkatan kesadaran gender di seluruh lapisan masyarakat.

Hambatan Sosial dan Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki kebijakan perlindungan perempuan, seperti Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 dan berbagai program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKB3APM), implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga psikolog dan pendamping korban, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, banyak korban tidak mengetahui hak mereka dan enggan melaporkan kejadian yang dialami.

Data sekunder menunjukkan bahwa jumlah kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke UPTD PPA hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut (Kharomah, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Palangkaraya, 2022) rendahnya angka pelaporan ini disebabkan oleh adanya victim blaming, stigma sosial terhadap korban, dan rasa tidak percaya pada lembaga hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar struktural dari masalah ketimpangan gender.

Dalam konteks kelembagaan, penelitian (Saragih, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan di Palangka Raya belum memiliki kebijakan yang tegas dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban pelecehan. Ketika kasus terjadi di lingkungan sekolah atau kampus, korban sering

kali tidak mendapat dukungan karena dianggap mencemarkan nama baik institusi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan melalui pembentukan unit khusus seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang telah diterapkan di beberapa universitas di Indonesia.

Penerapan Pemahaman Studi Gender sebagai Strategi Pencegahan dan Penanganan

Pemahaman studi gender terbukti menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pencegahan pelecehan seksual di Palangka Raya. Upaya ini terlihat dari inisiatif beberapa lembaga pendidikan yang mulai memasukkan nilai kesetaraan gender dalam kurikulum dan kegiatan sosialisasi mahasiswa. Misalnya, IAIN Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya telah membentuk program sosialisasi dan Satgas PPKS yang bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual (UPR), 2023)

Selain di bidang pendidikan, penerapan studi gender juga dilakukan melalui kampanye publik dan pelatihan kesadaran gender yang diselenggarakan oleh DPPKB3APM dan organisasi masyarakat sipil. Program-program ini berfokus pada pembentukan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pelecehan seksual, penghapusan stigma terhadap korban, dan peningkatan keberanian perempuan untuk melapor. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Suprobowati, Pengaruh media sosial terhadap pelecehan seksual dan persepsi gender di Indonesia, 2025) yang menekankan pentingnya pendidikan kesetaraan gender dan literasi media untuk mengurangi pelecehan seksual, baik di ruang fisik maupun digital.

Selain itu, penerapan terapi dan konseling berbasis gender juga mulai dikembangkan di Palangka Raya sebagai bagian dari upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan psikologis korban, tetapi juga bertujuan mengubah pola pikir pelaku agar tidak mengulangi tindakannya (Putriana, 2024) Melalui strategi yang integratif antara pendidikan, kebijakan publik, dan pemberdayaan perempuan, Palangka Raya diharapkan dapat menjadi kota yang lebih aman dan responsif terhadap isu kesetaraan gender.

Interpretasi Temuan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan di Palangka Raya merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki, lemahnya sistem perlindungan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu gender. Temuan ini memperkuat teori bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari ketimpangan kuasa dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga perubahan sosial yang mendasar melalui pendidikan gender, reformasi kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Palangka Raya merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan gender yang berakar pada sistem sosial patriarki. Fenomena ini tidak hanya muncul sebagai pelanggaran individu, tetapi juga merupakan hasil dari struktur sosial dan budaya yang masih bias terhadap perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang, stereotipe gender, serta lemahnya implementasi kebijakan perlindungan menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan perempuan terhadap pelecehan seksual.

Upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menunjukkan kemajuan, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran gender di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan perspektif studi gender menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran sosial dan kebijakan yang berkeadilan. Melalui pendidikan kesetaraan gender, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan perempuan, lingkungan sosial yang aman, adil, serta bebas dari pelecehan seksual dapat diwujudkan. Dengan demikian, pendekatan studi gender tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih setara dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. (2023). *Laporan tahunan perlindungan perempuan dan anak*. Palangka Raya: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Handayani, I. T. (2024). Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palangkaraya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 45–59.
- Hawini, N. (2024). Studi gender dan kekerasan terhadap perempuan: Analisis struktural dan budaya patriarki. *Jurnal Studi Gender*, 87–103.
- Kharomah, A. P. (2022). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Palangkaraya*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Kharomah, A. P. (2022). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Palangkaraya*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Nurleni, N. (2022). Hambatan pelaporan kasus pelecehan seksual perempuan di Palangkaraya. *Jurnal Sosiologi*, 115–130.
- Putriana, R. (2024). Terapi dan konseling berbasis gender untuk korban pelecehan seksual di Palangkaraya. *Jurnal Psikologi Sosial*, 25–40.
- Raya, P. K. (2019). *Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Raya, U. P. (2023). *Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palangka Raya*. Kota Palangka Raya: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKB3APM) Kota Palangka Raya.
- Raya, U. P. (2023). *Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKB3APM) Kota Palangka Raya.
- Riyanti, R. (2019). Analisis stereotipe gender dan budaya pemerkosaan. *Jurnal Restorica*, 58–70.
- Riyanti, R. (2019). Analisis stereotipe gender dan budaya pemerkosaan. *Jurnal Restorica*, 58–70.
- Saragih, H. (2023). Evaluasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual di institusi pendidikan Palangkaraya. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 102–117.
- Suprobawati, G. D. (2025). Pengaruh media sosial terhadap pelecehan seksual dan persepsi gender di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Massa*, 70–85.
- Suprobawati, G. D. (2025). Pengaruh media sosial terhadap pelecehan seksual dan persepsi gender di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Massa*, 70–85.
- UPR), L. P. (2023). *Laporan implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan Universitas Palangka Raya*. Palangka Raya: LPPM Universitas Palangka Raya.